



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

2024

KOTA MADIUN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini di samping menjabarkan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2024, yang meliputi aspek urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pelaksanaan tugas pembantuan, serta capaian indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan, juga mencantumkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai media evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terselesaikannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2024 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi referensi dalam melaksanakan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala upaya kita.

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Madiun, 26 Maret 2025

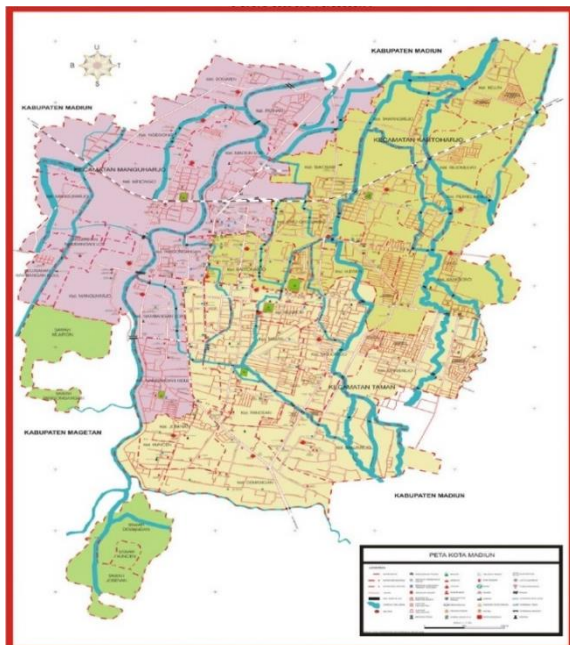


Dr. Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

A. DATA UMUM DAERAH

KONDISI GEOGRAFIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa



Kota Madiun terletak pada 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas $33,23 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar $12,46 \text{ km}^2$ (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas $10,73 \text{ km}^2$ (32,29%), dan

Kecamatan Manguharjo seluas $10,04 \text{ km}^2$ (30,21%).

Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 329 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 399 RT dan 107 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2024 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebanyak 201.773 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 99.077 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 102.656 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 73.967 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	29.736	30.601	60.337
2.	Taman	41.945	43.496	85.441
3.	Kartoharjo	27.396	28.559	55.955
Jumlah		99.077	102.656	201.733

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	16.513	6.163	22.676
2.	Taman	22.796	8.054	30.850
3.	Kartoharjo	15.114	5.327	20.441
Jumlah		54.423	19.544	73.967

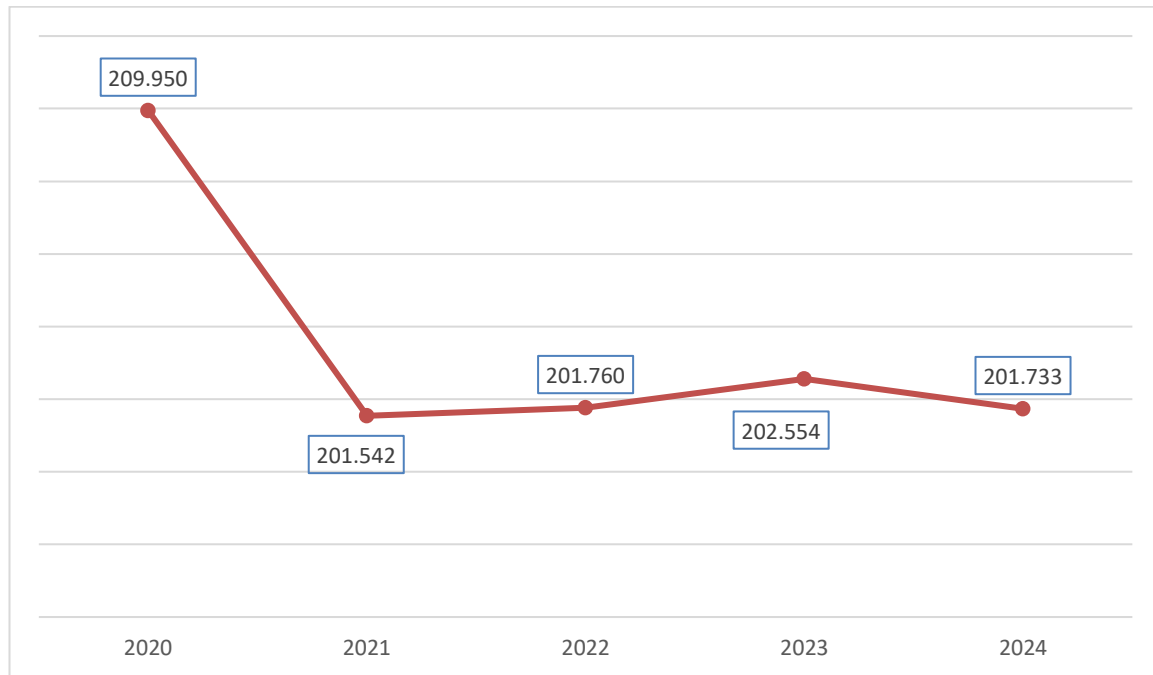
Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	35.059
2.	Mengurus Rumah Tangga	32.556
3.	Pelajar/ Mahasiswa	39.797
4.	Pensiunan	5.982
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5.714
6.	TNI - POLRI	2.610
7.	Karyawan BUMN	1.529
8.	Karyawan BUMD	192
9.	Karyawan Swasta	46.585
10.	Buruh/ Tukang	5.781
11.	KDH, WKDH, DPR, DPRD	11
12.	Guru/ Dosen	2.252
13.	Agamawan	100
14.	Kesehatan	829
15.	Pedagang	2.555
16.	Pekerjaan Lainnya	20.181
Jumlah		201.733

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 s.d 2024



Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

APARATUR SIPIL NEGARA

Jumlah ASN Kota Madiun menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II)	27
2.	Jabatan Administrator (Eselon III)	97
3.	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	218
4.	Jabatan Fungsional	2.423
5.	Jabatan Pelaksana	542
Jumlah		3.307

Sumber : BKPSDM Kota Madiun

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ringkasan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
I	Pendapatan	1.132.832.604.933,00	1.171.506.049.718,60	103,41%
1	Pendapatan Asli Daerah	262.282.977.933,00	279.222.352.932,97	106,46%
	1) Pajak Daerah	109.603.926.000,00	121.651.792.796,00	110,99%
	2) Retribusi Daerah	136.312.408.000,00	138.895.835.650,97	101,90%
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	14.127.425.900,00	13.456.071.814,53	95,25%
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.239.218.033,00	5.218.652.671,47	233,06%
2	Pendapatan Transfer	870.549.627.000,00	892.283.696.785,63	102,50%
	1) Pendapatan Transfer Pusat	762.805.557.000,00	774.640.399.685,63	101,55%
	2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.744.070.000,00	117.643.297.100,00	109,19%
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	-	-
	1) Pendapatan Hibah	-	-	-
	2) Dana Darurat	-	-	-
	3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-
	Hibah Dana BOS	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-
	Bantuan Keuangan Provinsi/ Pemda Lainnya	-	-	-

Sumber : LK Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 Audited, BKAD Kota Madiun

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

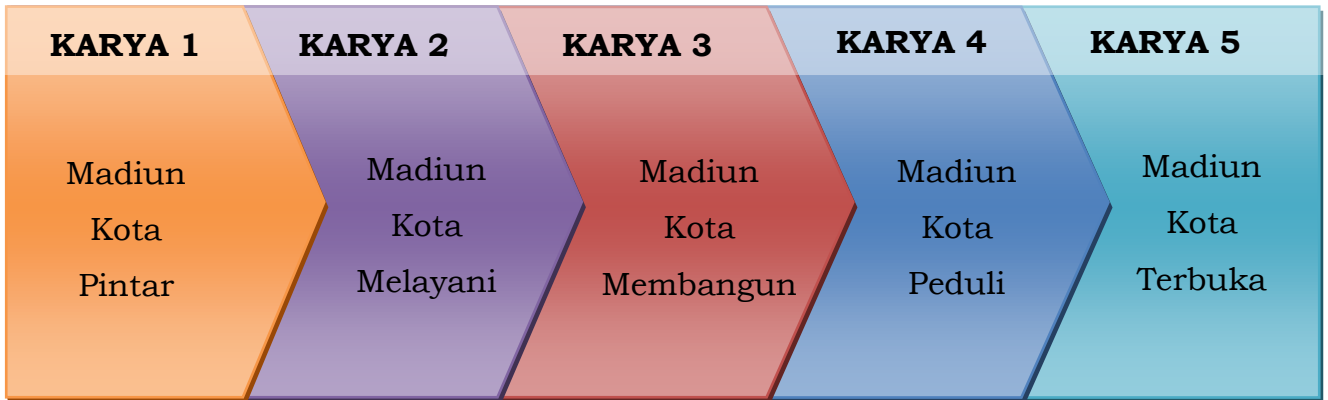
VISI

**Terwujudnya
Pemerintahan
Bersih Berwibawa
Menuju Masyarakat
Sejahtera**

MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2019-2024 diwujudkan dalam **Panca Karya** sebagai berikut :



Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 adalah **“Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal”**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024

1. Penguatan penerapan reformasi birokrasi pemerintah kota madiun berbasis *Smart City*;
2. Peningkatan kemandirian ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial;
4. Penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro yang diperoleh oleh Kota Madiun Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	84,51	0,956%
2.	Angka Kemiskinan	4,74	4,38	-7,595%
3.	Angka Pengangguran	5,85	4,30	-26,496%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,80	5,73	-1,207
5.	Pendapatan per Kapita	17.256.200.000.000	18.653.200.000.000	8,096%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,416	0,435	4,567%

Sumber : Berita Resmi Statistik 2024, BPS Kota Madiun

C. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	100%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	100%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang	100%	92,58%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 233.813.807.622 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	171.194.443.000	168.796.485.052
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7.203.000.000	6.228.743.550
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163.991.443.000	159.105.311.610
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.141.415.000	2.959.222.936
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.714.500	54.295.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.000.000	448.911.956
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	428.190.000	11.331.764.962
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.578.636.514	11.331.764.962
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.966.035.868	12.757.023.900
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.627.820.330	8.121.590.053
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.564.892.400	1.410.436.105
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.201.204.299	1.197.194.376
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	962.963.579	959.749.476
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	238.240.720	237.444.900
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.053.205.561	1.032.048.760
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan	1.053.205.561	1.032.048.760

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	428.190.000	432.654.397
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	428.190.000	432.654.397
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	181.350.000	194.360.658
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	181.350.000	194.360.658
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	484.520.000	483.664.700
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	484.520.000	483.664.700
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	250.440.000	246.374.605
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	250.440.000	246.374.605
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	456.300.000	450.288.897
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	456.300.000	450.288.897
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	151.200.000	134.970.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	151.200.000	134.970.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	307.470.000	274.780.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	307.470.000	274.780.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	249.390.000	282.039.953
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	249.390.000	282.039.953
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	185.500.000	177.127.765
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	185.500.000	177.127.765
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	255.720.000	257.689.815
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	255.720.000	257.689.815
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	251.430.000	217.151.761
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	251.430.000	217.151.761
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	106.920.000	112.852.351
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	106.920.000	112.852.351
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	348.384.679	378.416.535
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	348.384.679	378.416.535
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.390.000	224.321.700
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	219.390.000	224.321.700

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	126.930.000	126.906.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	126.930.000	126.906.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	291.600.000	265.535.650
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	291.600.000	265.535.650
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	380.910.000	380.892.320
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	380.910.000	380.892.320
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	473.620.000	458.769.620
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	473.620.000	458.769.620
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	273.780.000	263.969.592
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	273.780.000	263.969.592
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	170.280.000	166.999.505
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	170.280.000	166.999.505
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	152.070.000	152.035.945
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	152.070.000	152.035.945
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	733.320.000	712.710.226
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	733.320.000	712.710.226
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	374.940.000	371.829.195
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	374.940.000	371.829.195
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	725.630.000	751.078.459
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	725.630.000	751.078.459
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	194.010.000	251.428.102
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	194.010.000	251.428.102
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	173.850.000	183.674.786
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	173.850.000	183.674.786
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	452.580.000	410.663.750
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	452.580.000	410.663.750
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	510.610.000	512.675.860
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	510.610.000	512.675.860
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.940.000	132.989.920
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	137.940.000	132.989.920

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	226.320.000	241.123.672
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	226.320.000	241.123.672
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	355.920.000	351.873.400
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	355.920.000	351.873.400
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	527.630.000	548.557.009
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	527.630.000	548.557.009
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	229.290.000	226.296.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	229.290.000	226.296.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	169.740.000	156.869.284
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	169.740.000	156.869.284
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	244.390.000	229.794.765
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	244.390.000	229.794.765
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	447.540.000	438.667.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	447.540.000	438.667.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	435.810.000	428.679.288
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	435.810.000	428.679.288
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	564.350.000	573.221.540
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	564.350.000	573.221.540
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	206.430.000	198.485.913
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	206.430.000	198.485.913
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	672.710.000	656.941.506
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	672.710.000	656.941.506
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	451.030.000	446.180.918
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	451.030.000	446.180.918
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	405.720.000	401.891.555
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	405.720.000	401.891.555
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	211.200.000	205.705.176
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	211.200.000	205.705.176
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	280.560.000	274.652.930
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	280.560.000	274.652.930

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	221.730.000	214.675.054
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	221.730.000	214.675.054
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	231.990.000	227.397.283
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	231.990.000	227.397.283
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	268.950.000	264.243.606
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	268.950.000	264.243.606
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.550.000	231.669.139
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.550.000	231.669.139
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.480.000	140.807.325
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	150.480.000	140.807.325
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	129.240.000	129.551.636
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	129.240.000	129.551.636
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	178.020.000	178.052.781
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	178.020.000	178.052.781
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.127.210.000	1.125.974.824
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.127.210.000	1.125.974.824
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.254.060.000	1.241.927.417
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.254.060.000	1.241.927.417
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	884.200.000	848.102.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	884.200.000	848.102.500
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.174.170.000	1.181.164.100
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.174.170.000	1.181.164.100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	682.730.000	698.363.457
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	682.730.000	698.363.457
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	922.220.000	911.735.261
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	922.220.000	911.735.261
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.156.660.000	1.149.985.639
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.156.660.000	1.149.985.639
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	722.770.000	709.246.825
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	722.770.000	709.246.825

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	738.370.000	711.019.175
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	738.370.000	711.019.175
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	841.780.000	863.433.800
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	841.780.000	863.433.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	987.360.000	954.690.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	987.360.000	954.690.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	821.410.000	842.639.665
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	821.410.000	842.639.665
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	987.760.000	1.015.103.461
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	987.760.000	1.015.103.461
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	395.560.000	405.520.887
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	395.560.000	405.520.887
	Jumlah	241.478.262.651	233.813.807.622

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Masalah
1.	Masih tingginya cluster sekolah oleh masyarakat
2.	Kurangnya tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi guru dan kualifikasi pendidikan S2
3.	Kurangnya diferensiasi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam penggunaan teknologi
4.	Kurangnya pembelajaran yang bersifat joyfull learning
5.	Anak tidak sekolah karena faktor sosial di keluarga dan masyarakat seperti keluarga yang bermasalah

2. URUSAN KESEHATAN

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	5,81%	6,19%
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	deteksi dini HIV sesuai standar		

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 101.623.032.613 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.759.962.120	42.634.442.017
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.772.574.335	6.223.578.470
	Pengembangan Puskesmas	240.000.000	186.936.000
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	220.326.000	213.144.320
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.327.083.000	1.186.809.400
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	297.792.042	260.734.638
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.644.460.593	4.333.042.812
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	42.912.700	42.911.300
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.987.387.785	36.410.863.547
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	301.863.700	294.949.700
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.936.800	13.648.600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109.723.000	98.411.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	535.214.200	528.658.730

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	48.466.000	48.466.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	196.537.500	187.647.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.400.000	14.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	813.394.600	803.559.650
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	105.700.000	99.300.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	194.174.800	187.680.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	139.609.068	35.658.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	210.075.200	210.038.900
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	154.252.800	145.188.655
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.083.400	30.083.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	27.616.200	26.073.800
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.269.019.400	1.063.345.059
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.495.324.800	30.385.679.670
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	29.686.000	14.513.100
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	402.506.900	341.916.500
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.117.659.017	1.107.032.483
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000	1.500.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	670.680.000	668.014.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	14.400.000	14.400.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	11.402.800	10.930.400
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	80.161.600	79.768.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	442.559.000	422.832.500
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	69.282.000	68.820.000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	69.282.000	68.820.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.277.000	354.012.500
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.277.000	354.012.500
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	305.327.000	274.710.600
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.786.000	60.488.800
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.786.000	60.488.800
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	241.541.000	214.221.800
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	241.541.000	214.221.800

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.888.168.800	3.819.996.329
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.749.600	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	262.749.600	244.502.549
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.625.419.200	3.575.493.780
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.625.419.200	3.575.493.780
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.044.931.312	54.471.051.167
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.390.950	273.254.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.362.600	72.788.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	184.565.600	184.565.600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.462.750	15.900.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.903.223.077	51.644.990.291
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.903.223.077	51.644.990.291
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.830.080.285	1.708.359.816
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.280.080.285	1.169.263.430
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.000.000	539.096.386
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.306.000	338.218.500
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.417.000	112.200.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	228.889.000	226.018.500

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	680.931.000	506.228.360
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	389.312.000	269.233.536
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.745.600	71.908.381
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.873.400	165.086.443
	Rumah Sakit Umum Daerah	141.623.217.899	139.652.676.446
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	13.953.886.279	13.624.478.288
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.953.886.279	13.624.478.288
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	621.878.000	616.806.508
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.439.374.666	1.257.622.400
	Pengembangan Rumah Sakit	3.767.633.613	3.634.086.240
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.125.000.000	8.115.963.140
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.669.331.620	126.028.198.158
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.716.129.752	31.550.977.268
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.716.129.752	31.550.977.268
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	442.400.000	380.800.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.400.000	380.800.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	94.510.801.868	94.096.420.890
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	94.510.801.868	94.096.420.890
	Puskesmas Manguharjo	2.790.584.000	2.677.089.500
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	2.790.584.000	2.553.761.500

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.790.553.000	2.553.761.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.680.000	10.680.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	51.752.000	50.002.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.000.000	20.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000	1.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	579.258.000	577.896.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.050.000	4.050.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33.985.000	33.636.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21.450.000	21.450.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.013.055.000	1.779.775.100
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.683.000	7.632.400
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000	2.400.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.550.000	1.550.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	250.000	250.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.160.000	8.160.000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	35.280.000	35.280.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	31.000	0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	31.000	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	126.232.000	123.328.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.232.000	123.328.000
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	126.232.000	123.328.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
	Puskesmas Ngegong	2.525.521.000	2.409.233.450
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.394.639.000	2.278.384.350
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.394.629.000	2.255.809.350
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.120.000	10.120.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	68.450.000	68.450.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.400.000	20.400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.500.000	3.500.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.000.000	5.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	520.433.000	512.129.300
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.000.000	3.000.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.760.000	46.310.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18.650.000	18.600.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.663.606.000	1.556.378.850
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.675.000	7.661.200
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	250.000	100.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	800.000	800.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	50.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.360.000	3.360.000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	22.575.000	22.575.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	10.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	130.882.000	130.849.100

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.882.000	130.849.100
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	130.882.000	130.849.100
	Puskesmas Sukosari	2.778.153.000	2.633.655.293
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.647.201.000	2.503.960.093
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.647.189.000	2.491.160.093
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.350.000	13.350.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	66.945.000	66.945.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.750.000	8.750.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.200.000	1.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.000.000	4.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	661.968.600	659.211.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.300.000	5.300.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	53.436.200	53.053.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17.900.000	17.900.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.783.593.000	1.643.552.993
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.677.000	7.632.400
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	250.000	250.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000	600.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.200.000	1.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.219.200	8.215.500
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12.800.000	12.800.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000	0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	130.952.000	129.695.200
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.952.000	129.695.200
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	130.952.000	129.695.200
	Puskesmas Tawangrejo	2.647.729.000	2.481.697.363
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.520.959.000	2.354.931.363
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.520.935.000	2.354.931.363
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.046.000	34.992.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.638.000	36.610.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000	13.200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	400.000	400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000	2.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	504.863.600	504.344.800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.100.000	5.100.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.799.000	36.272.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	21.800.000	21.050.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.826.613.000	1.662.555.163
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000	150.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	400.000	400.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	400.000	400.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.917.400	1.899.000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	35.558.000	35.558.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	24.000	0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	24.000	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	126.770.000	126.766.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.770.000	126.766.000
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	126.770.000	126.766.000
	Puskesmas Banjarejo	3.505.429.000	3.356.290.679
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.375.450.000	3.228.340.079
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.375.390.200	3.210.320.079
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.240.000	12.240.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.584.000	28.284.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.000.000	15.250.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.750.000	5.750.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000	2.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	900.673.200	894.345.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.050.000	2.050.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	70.603.800	70.278.400
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.100.000	31.550.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.265.412.200	2.129.359.579

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.147.000	7.402.600
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000	600.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	250.000	250.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000	100.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.860.000	10.860.000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	18.120.000	18.020.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	59.800	0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	59.800	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	129.979.000	127.950.600
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	129.979.000	127.950.600
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	129.979.000	127.950.600
	Puskesmas Demangan	3.215.701.000	3.031.898.648
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.090.216.000	2.910.946.348
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.090.152.600	2.837.006.348
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.440.000	11.360.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.208.500	17.558.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.000.000	8.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.500.000	1.500.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11.000.000	11.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	825.477.000	824.890.800

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.050.000	5.050.000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	49.682.500	48.382.500
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	26.250.000	25.850.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.040.944.600	1.866.420.348
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.070.000	6.712.200
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000	300.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.500.000	1.500.000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	200.000	200.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.590.000	8.282.000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	73.940.000	73.940.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	63.400	0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	63.400	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	125.485.000	120.952.300
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.485.000	120.952.300
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	125.485.000	120.952.300
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.923.247.000	2.864.086.761
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	213.907.000	212.849.653
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	213.907.000	212.849.653
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	165.361.000	165.160.500
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48.546.000	47.689.153
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.355.866.000	1.339.485.658
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	949.314.000	937.733.100
	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	139.745.900
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana		
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	364.314.000	362.938.600
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	45.000.000	44.725.500
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	149.156.900
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000	241.166.200
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	82.200.000	82.200.000
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	82.200.000	82.200.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	253.402.000	248.644.358

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.300.000	14.950.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	221.452.000	217.063.358
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16.650.000	16.631.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.950.000	70.908.200
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.707.000	3.706.600
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	67.243.000	67.201.600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.353.474.000	1.311.751.450
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	408.474.000	401.651.450
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.800.000	28.664.500
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	79.674.000	75.066.950
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	297.920.000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan		

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	945.000.000	910.100.000
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	450.000.000	415.100.000
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	495.000.000	495.000.000
	Jumlah	107.440.948.232	101.623.032.613

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Masalah
1.	Sehubungan terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 pada 2 Februari 2024, terdapat perubahan jumlah sasaran cukup signifikan (sasaran terlalu tinggi) dibanding sasaran Tahun 2023
2.	Adanya perubahan peraturan terkait SPM Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang mulai berlaku di 3 April 2024

No	Masalah
3.	Adanya perubahan definisi operasional pelayanan kesehatan usia produktif, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 dengan perhitungan capaian berasal dari data komposit yang berasal dari lintas program sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang maksimal dengan lintas program terkait. Belum ada metode perhitungan capaian yang seragam dari pengelola program di level Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pelaporan SPM pada aplikasi e-SPM Bangda belum memfasilitasi perhitungan komposit sesuai Permenkes terbaru

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten/kota	0,13	0,53
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	100%	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	0
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota SPAM	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,87%	99,87%
6.	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100%	100%
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	98,28%	98,44%
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	104%	106,50%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%

b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 101.623.032.613 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.580.676.000	11.893.261.130
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.580.676.000	11.893.261.130
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	463.562.000	454.687.000
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.390.980.000	1.176.513.408
	Normalisasi/Restorasi Sungai	7.600.334.000	7.221.438.642
	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	3.125.800.000	3.040.622.080
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.905.323.500	1.541.603.590
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.905.323.500	1.541.603.590

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	786.635.000	653.661.082
	Peluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.118.688.500	887.942.508
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.352.748.400	11.410.246.073
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.352.748.400	11.410.246.073
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.443.117.000	8.001.739.780
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	937.950.000	752.311.050
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	2.971.681.400	2.656.195.243
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	23.584.359.814	22.981.707.842
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	23.584.359.814	22.981.707.842
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	352.000.000	348.279.200
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	22.927.318.500	22.367.819.142
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	305.041.314	265.609.500
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	22.045.832.500	21.649.191.104
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan	22.045.832.500	21.649.191.104

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	22.045.832.500	21.649.191.104
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	38.554.253.532	38.181.409.647
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	38.554.253.532	38.181.409.647
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	502.840.232	441.639.100
	Pembangunan Jalan	1.638.050.000	1.589.930.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	17.236.476.200	17.096.583.269
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	279.150.000	275.768.912
	Pembangunan Jembatan	10.207.932.600	10.159.300.000
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	3.005.795.000	2.982.668.627
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	406.100.000	403.310.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.277.909.500	5.232.209.739
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.251.039.058	1.060.251.400
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	380.352.058	240.168.930
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	380.352.058	240.168.930
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	870.687.000	820.082.470
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	870.687.000	820.082.470
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.596.253.128	1.510.557.054
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	800.000.000	798.039.652
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	800.000.000	798.039.652
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	0	0

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	396.480.000	367.176.690
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	396.480.000	367.176.690
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	399.773.128	345.340.712
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	399.773.128	345.340.712
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.829.034.007	13.108.114.010
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.589.784	295.958.260
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	310.589.784	295.958.260
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.270.225.630	6.376.713.078
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.270.225.630	6.376.713.078
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	433.550.000	405.076.702
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.550.000	405.076.702
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.026.925.198	939.543.020
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	830.307.838	744.030.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.617.360	195.513.020
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.563.459.395	3.897.772.616
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.563.459.395	3.897.772.616
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.224.284.000	1.193.050.334
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	512.624.000	502.935.379

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	711.660.000	690.114.955
	Jumlah	128.699.519.939	123.336.341.850

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Masalah
Pengumpulan Data	
1.	Pada saat ini Kota Madiun dalam tahap Pembangunan IPLT belum ada operasional dan belum mempunyai data volume pengolahan limbah tinja setiap bulannya
2.	Jumlah rumah tangga di Kota Madiun belum mempunyai data yang sama antara Dinas Kesehatan dan DPUPR
Perhitungan Kebutuhan	
3.	Adanya keterbatasan taraf hidup masyarakat yang menyebabkan beberapa masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membayar abunemen berlangganan PDAM sehingga masih ada pemutusan jaringan PDAM
4.	Pertumbuhan penduduk dari kebutuhan pemenuhan jaringan perpipaan bersifat dinamis sehingga updating data perlu dilaksanakan secara berkala
Perencanaan dan Penganggaran	
5.	Pada saat perencanaan sudah dilakukan identifikasi masyarakat yang belum memenuhi jaringan perpipaan, tetapi pada saat dilaksanakan dilapangan terjadi penolakan sedangkan sudah dianggarkan, sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal
6.	Anggaran yang terbatas sehingga perlu dilaksanakan perencanaan secara bertahap
Pelaksanaan	
7.	Pada saat melaksanakan fisik dilapangan penambahan jaringan perlu dilaksanakan perencanaan secara bertahap
8.	Pada tw 4 terjadi perubahan target karena adanya hasil dari pelaksanaan kegiatan DAK program Sistem Penyediaan Air (SPAM) tematik dan stunting sesuai SK Walikota Madiun Nomor ; 400-401.110/284/2024 tentang Penerimaan Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Program Sistem Penyediaan Minum TA 2024 <ul style="list-style-type: none"> Sesuai permen PU No. 29/PRT/M/2018 tentang standart teknis Standart Pelayanan Minimal cakupan pelayanan air limbah domestik yang berasal dari pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Di kota

No	Masalah
	Madiun air limbah permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, limbah usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup. DPUPR sebagai pengampu laporan SPM harus koordinasi dengan perangkat daerah terkait sehingga memerlukan waktu dalam kecukupan data SPM

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kotapemerintah kabupaten/kota	100%	100%
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	6,82%	21,32%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah Tidak Layak Huni)	0,28%	0,10%
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	100%	100%

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 43.422.032.828 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.207.724.111	9.818.198.979
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.673.400	20.905.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.673.400	20.905.300
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.243.232.695	5.016.539.499
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.175.232.695	4.948.725.249
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.000.000	67.814.250
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.429.000	129.500.050
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	122.429.000	120.075.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.425.050
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.880.000	233.581.929
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.880.000	233.581.929
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.738.171	214.488.200
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.738.171	214.488.200
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.179.289.095	2.136.617.861
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.179.289.095	2.136.617.861
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.179.481.750	2.066.566.140
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.690.986.550	1.612.826.790
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.839.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	388.495.200	353.899.850
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.922.750.000	1.884.597.240
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	118.950.000	111.239.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	118.950.000	111.239.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.657.900.000	1.632.969.340
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.657.900.000	1.632.969.340
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	145.900.000	140.388.900
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	145.900.000	140.388.900
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.433.326.000	15.421.221.816
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	220.000.000	216.899.700
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	220.000.000	216.899.700
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	17.213.326.000	15.204.322.116
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.708.700.000	2.706.230.600
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	14.504.626.000	12.498.091.516
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	16.746.929.527	16.298.014.793
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	16.746.929.527	16.298.014.793
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	16.746.929.527	16.298.014.793
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	805.792.250	677.527.064
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	32.413.750	28.762.650
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.413.750	28.762.650
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.413.750	28.762.650
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	773.378.500	648.764.414

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	773.378.500	648.764.414
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	773.378.500	648.764.414
	Jumlah	46.310.729.638	43.422.032.828

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Masalah
1.	Warga atau korban relokasi tidak bersedia pindah dikarenakan lokasi rumah susun yang disediakan untuk korban bencana lokasinya terlalu jauh dengan mereka tinggal, dan ada anaknya yang masih sekolah dan tempat sekolahnya terlalu jauh dengan lokasi rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah
2.	Untuk penyediaan rumah layak huni terkendala terkait ketersediaan lahan yang semakin menipis khususnya di kawasan perkotaan

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan kabupaten/kotapemerintah kabupaten/kota	100%	100%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
	kesiapsiagaan terhadap bencana		
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
7.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	11	8,43

b. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 19.187.818.798 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.023.972.562	12.697.430.698
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.567.000	177.197.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	186.567.000	177.197.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.091.974.275	6.476.757.959
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.091.974.275	6.476.757.959
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	675.200.000	669.976.500
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	675.200.000	669.976.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.576.400	291.864.929
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.576.400	291.864.929
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.584.856.000	1.574.251.182

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.136.946.700	1.134.410.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.600.000	203.684.082
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.309.300	236.157.100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.926.854.590	2.698.192.916
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.947.854.590	2.698.192.916
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.245.944.297	809.189.512
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	895.418.387	483.580.510
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.662.410	229.528.001
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.863.500	96.081.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.161.805.425	5.431.227.360
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.426.395.113	4.069.469.900
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	102.716.000	80.728.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.030.068.913	2.788.680.700
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	383.500.200	360.076.700

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	395.939.000	341.713.000
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	514.171.000	498.271.500
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.665.758.700	1.334.925.460
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.133.741.100	1.051.917.760
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	532.017.600	283.007.700
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	69.651.612	26.832.000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	69.651.612	26.832.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.386.141.000	1.059.160.740
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.384.773.000	1.057.880.740
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.084.545.000	867.745.540
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.228.000	190.135.200
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.368.000	1.280.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.368.000	1.280.000
	Jumlah	21.571.918.987	19.187.818.798

Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana di Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 4.067.167.434 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.375.265.000	1.300.711.093
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	26.948.000	26.237.500
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	26.948.000	26.237.500
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.134.461.000	1.133.740.593
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	27.484.000	27.474.000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	889.410.000	889.410.000
	Penyusunan Rencana Kontijensi	48.000.000	48.000.000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	42.204.000	41.919.500
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	9.542.000	9.542.000
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	117.821.000	117.395.093
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	93.410.000	93.065.000
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	83.460.000	83.145.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.950.000	9.920.000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	120.446.000	47.668.000
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	120.446.000	47.668.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.820.671.806	2.766.456.341
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.381.000	1.072.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.381.000	1.072.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.710.324.806	1.699.080.829
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.710.324.806	1.699.080.829
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	194.746.927
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.945.000	65.200.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.945.000	65.200.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.773.000	400.602.275
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	413.773.000	400.602.275
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.773.000	405.754.310
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.868.000	237.789.810
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.850.000	151.507.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.530.000	16.457.500
	Jumlah	4.195.936.806	4.067.167.434

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Masalah
Sekretariat	
1.	Kurangnya sumber daya manusia yang memadai
2.	Koordinasi dan sinergi yang belum optimal
3.	Tantangan Pemanfaatan teknologi
4.	Kurangnya SOP yang terpadu
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
6.	Adanya Konflik Sosial di masyarakat
7.	Adanya ketidaktertiban aktivitas masyarakat di ruang publik
8.	Adanya keterbatasan sarana dan prasarana keamanan
9.	Kurangnya partisipasi masyarakat
10.	Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas personil Satpol PP dan Damkar
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	
11.	Kapatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang undangan daerah yang masih kurang
12.	Koordinasi antar perangkat daerah dan instansi lain yang belum optimal
13.	Kapasitas aparatur yang terbatas
14.	Kurangnya sosialisasi peraturan perundang undangan daerah
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
15.	Kurangnya tenaga/ personil yang terlatih
16.	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
17.	Belum optimalnya upaya pencegahan melalui inspeksi, edukasi/sosialisasi dan pengawasan terhadap bangunan untuk proteksi kebakaran
18.	Kurangnya sarana dan prasarana
Bidang Bencana	
19.	Minimnya Sarana dan Prasarana / Peralatan Penanggulangan Bencana
20.	Kurangnya Logistik dalam pemenuhan penanggulangan bencana

6. URUSAN SOSIAL

a. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Madiun pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indicator SPM)	100%	100%
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%

b. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp 19.187.818.798 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.118.231.537	7.368.807.781
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.401.840	150.089.158
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.979.400	120.901.840
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.082.310	19.919.112
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.340.130	9.268.206
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.773.528.377	5.284.452.049
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.670.118.024	5.181.962.296

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	103.410.353	102.489.753
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.817.000	229.310.650
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	244.928.000	182.070.650
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47.889.000	47.240.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.237.000	260.315.444
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311.237.000	260.315.444
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.380.000	18.314.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.380.000	18.314.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.748.200	1.012.561.490
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	591.528.200	550.621.490
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	499.220.000	461.940.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.119.120	413.764.990
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.187.000	149.845.880
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.014.120	177.200.135
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.918.000	86.718.975
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.265.196.184	3.085.368.687

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.265.196.184	3.085.368.687
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	386.354.400	376.272.200
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.564.704	47.298.382
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	119.188.280	116.628.305
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.712.088.800	2.545.169.800
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.931.608.371	3.434.476.373
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.308.251.936	2.884.205.883
	Penyediaan Permakanan	393.436.600	264.039.700
	Penyediaan Sandang	313.326.936	262.234.682
	Penyediaan Alat Bantu	26.269.000	22.877.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	18.128.000	8.981.161
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.500.000	7.900.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.144.307.800	1.964.701.740
	Pemberian Layanan Kedaruratan	403.283.600	353.471.600
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	623.356.435	550.270.490

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pemberian Layanan Kedaruratan	272.075.800	215.030.000
	Penyediaan Permakanan	89.906.700	89.906.700
	Penyediaan Sandang	9.284.800	9.284.800
	Penyediaan Alat Bantu	20.134.000	9.742.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	25.309.635	25.189.990
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	79.150.000	79.150.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	118.431.500	118.431.500
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.064.000	3.535.500
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.120.631.330	12.129.604.359
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	4.183.000	1.250.000
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	2.100.000	900.000
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	1.883.000	300.000
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	200.000	50.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13.116.448.330	12.128.354.359
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.105.190.422	1.069.841.500
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	278.544.300	272.102.600
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10.747.233.693	9.828.164.645
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	985.479.915	958.245.614
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	447.562.100	325.239.800
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	52.095.100	42.515.800
	Penyediaan Makanan	27.937.500	27.358.200
	Penyediaan Sandang	15.157.600	15.157.600
	Pelayanan Dukungan Psikososial	9.000.000	0
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	395.467.000	282.724.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	18.182.000	18.182.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	377.285.000	264.542.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	170.200.600	155.170.600
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	170.200.600	155.170.600
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	170.200.600	155.170.600
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	743.859.274	720.391.636
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	121.083.555	118.137.515
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	29.500.900	29.500.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	49.018.755	48.742.715
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	32.647.405	29.977.405
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	9.916.495	9.916.495
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.445.955	9.445.955
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9.445.955	9.445.955
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	613.329.764	592.808.166

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	592.817.178	572.315.580
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.512.586	20.492.586
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	299.929.753	296.284.203
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.789.640	83.499.100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.710.060	49.549.500
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.079.580	33.949.600
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	196.956.199	195.094.919
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	196.956.199	195.094.919
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.183.914	17.690.184
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12.388.114	11.023.984

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.795.800	6.666.200
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	210.271.527	200.019.527
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	148.802.727	138.550.727
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57.905.727	57.905.727
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90.897.000	80.645.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	61.468.800	61.468.800
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.468.800	61.468.800
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.627.961	66.562.961
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	67.627.961	66.562.961
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	326.795.688	264.517.051

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	59.474.369	56.268.269
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	59.474.369	56.268.269
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	267.321.319	208.248.782
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.983.948	16.976.532
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.169.750	94.287.950
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.964.700	62.580.200
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.202.921	34.404.100
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	73.268.687	69.188.500
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21.183.822	20.806.500
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	21.183.822	20.806.500
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	28.754.485	26.683.000

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.016.000	14.290.000
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	13.738.485	12.393.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.330.380	21.699.000
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	23.330.380	21.699.000
	Jumlah	17.654.551.682	15.986.027.119

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Masalah
1.	Pengumpulan data dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus
2.	Perhitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus
3.	Perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

No	Masalah
	Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidental ketika terjadi kasus
4.	Sumber Daya Manusia yang jumlahnya terbatas sehingga pelayanan tidak berjalan optimal

D. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berkenaan dengan hasil EPPD Kota Madiun Tahun 2023 yang belum tersedia. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Madiun berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **3,2179** dan status kinerja sedang.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 4/S-HP/XVIII.SBY/03/2025 Kota Madiun berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024, yang berarti pengelolaan keuangan di Kota Madiun dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

E. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun (*Audited*) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun 2024 mencapai sebesar Rp 1.171.506.049.718,60 dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2024 mencapai 1.172.206.504.141,49. Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Berdasarkan Pendapatan

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4	Pendapatan	1.132.832.604.933,00	1.171.506.049.718,60	103,41%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	262.282.977.933,00	279.222.352.932,97	106,46%
4.1.01	Pajak Daerah	109.603.926.000,00	121.651.792.796,00	110,99%
4.1.02	Retribusi Daerah	136.312.408.000,00	138.895.835.650,97	101,90%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.127.425.900,00	13.456.071.814,53	95,25%
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	2.239.218.033,00	5.218.652.671,47	233,06%
4.2	Pendapatan Transfer	870.549.627.000,00	892.283.696.785,63	102,50%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	762.805.557.000,00	774.640.399.685,63	101,55%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	730.207.858.000,00	725.271.874.685,63	99,32%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	510.653.158.000,00	509.310.785.281,00	99,74%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	34.637.942.000,00	29.693.124.361,00	85,72%
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	89.050.009.000,00	87.438.554.102,63	98,19%
4.2.01.06.01	Insentif Lokal	32.597.699.000,00	49.368.525.000,00	151,45%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	107.744.070.000,00	117.643.297.100,00	109,19%
4.2.02.01	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	107.074.020.000,00	116.973.247.100,00	109,25%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	670.050.000,00	670.050.000,00	100,00%

2. Berdasarkan Belanja

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5	Belanja	1.246.786.210.085,00	1.172.206.504.141,49	94,02%
5.1	Belanja Operasi	1.075.729.133.941,00	1.012.766.107.583,76	94,15%
5.1.01	Belanja Pegawai	470.001.490.757,00	438.170.995.927,75	93,23%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.647.293.235,00	497.881.778.674,38	94,54%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.04	Belanja Subsidi	50.000.000,00	49.955.750,00	99,91%
5.1.05	Belanja Hibah	45.969.265.421,00	45.781.591.231,63	99,59%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.061.084.528,00	30.881.786.000,00	93,41%
5.2	Belanja Modal	168.557.076.144,00	159.166.507.474,73	94,43%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.303.310.160,00	24.597.646.021,00	93,52%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.581.145.997,00	41.774.680.516,62	91,65%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.594.443.387,00	90.028.130.537,11	96,19%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.213.911.600,00	2.015.705.050,00	91,05%
5.3	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	273.889.083,00	10,96%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	273.889.083,00	10,96%
	Surplus/ Defisit	(113.953.605.152,00)	(693.448.422,89)	99,39%
6	Pembiayaan	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	113.953.605.152,00	113.953.605.152,46	100,00%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	113.953.605.152,00	113.953.605.152,00	100,00%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
	SILPA tahun Berkenaan		113.311.867.367,20	

F. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah merupakan komponen penting yang dilakukan suatu daerah sebagai penunjang perkembangan dan kemajuan suatu daerah, Inovasi Daerah Kota Madiun Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Bagian Organisasi	KOLAK BAPER (KOMPETISI administrasi ketatalaksanaan BAGI PERANGKAT daerah)	KOLAK BAPER berhasil meningkatkan kualitas administrasi ketatalaksanaan di Pemerintah Kota Madiun. Melalui kompetisi ini, perangkat daerah termotivasi untuk memperbaiki dan mematuhi SOP, yang berkontribusi pada disiplin pegawai dalam berpakaian dinas dan mematuhi jam kerja, Inovasi ini melibatkan berbagai instansi, seperti Bagian Organisasi, BKD, dan Inspektorat, sehingga layanan dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih kewenangan. Evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk memastikan keberhasilan implementasi dan peningkatan kualitas administrasi, dengan hasil yang menunjukkan skor evaluasi internal yang baik. KOLAK BAPER memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
2.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Siap Kakak	Sistem aplikasi kinerja yang digunakan dalam hal perencanaan dan penganggaran, yang dimulai dengan penyusunan pohon kinerja. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			ASN Kota Madiun dan terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai serta Pemberian Remunerasi. Aplikasi ini digunakan dalam mendukung proses evaluasi SAKIP Tahun 2024.
3.		KIAT (Kompetisi Inovasi kota) Madiun	KIAT (Kompetisi Inovasi Kota) Madiun adalah sebuah program yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Madiun untuk mendorong inovasi di tingkat daerah. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendukung, dan memberikan penghargaan kepada berbagai inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat, ASN, dan perangkat daerah. KIAT berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di Kota Madiun, menjadikannya sebagai salah satu langkah penting dalam memajukan daerah melalui inovasi.
4.		BERKAH KITA (BERSama Kita Ajukan Hasil Karya Intelektual teraTA).	BERKAH KITA berkontribusi pada perlindungan hak cipta dan pengembangan kreativitas di Kota Madiun, serta mendorong inovasi di kalangan masyarakat. Inovasi ini menyediakan layanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara gratis bagi inovator dan kreator, membantu mereka melindungi karya cipta mereka.

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BROKOHAN	Bayi Lahir Otomatis Entuk Dokumen Kependudukan dan Jaminan Kesehatan. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan bidan-bidan dan rumah sakit untuk segera melaporkan peristiwa bayi yang baru lahir melalui BROKOHAN untuk mendapatkan NIK di KK, Akte Kelahiran dan KIA.
6.	Dinas Kesehatan dan PPKB	PECEL SIP DOK (Pelayana Cepat dengan Elektronik Surat Izin Praktek Dokter)	Merupakan inovasi melalui sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan para dokter dalam melakukan permohonan Surat Izin Praktik (SIP), aplikasi ini mempersingkat proses permohonan surat dan dapat dilakukan dimana serta kapan saja dengan mengakses pengajuan permohonan surat keterangan langsung di aplikasi
7.		IKAN MAS TARJO (Survey Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tawangrejo)	Inovasi berupa survei kepuasan masyarakat sekaligus penyampaian saran atau keluhan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Tawangrejo, yang dilakukan secara mandiri menggunakan media elektronik. Untuk memudahkan akses seluruh masyarakat berperan aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Tawangrejo
8.		WSS (Warung Stop Stunting)	Inovasi Warung Stop Stunting bertujuan menurunkan angka stunting di Kota Madiun dengan sasaran ibu hamil dan balita stunting dengan menyediakan

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			makanan tambahan dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji. Kegiatan dilakukan seminggu sekali di lapak UMKM setiap kelurahan selama 9 minggu berupa : pengambilan bahan mentah, makan bersama, pemberian voucher belanja, pembinaan dari PKK Kelurahan.
9.		KARAMEL GULA (KenAli CaRA MeMELihara Kesehatan Gigi dan MULut Anak Balita)	Inovasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada ibu balita untuk meningkatkan kesadaran dalam mendampingi dan membiasakan anak memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Harapannya dapat menjadi sarana tambahan informasi kesehatan bagi ibu balita mengenai cara merawat kesehatan gigi dan mulut anak balita sejak dini, serta meningkatnya pengetahuan ibu balita tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut anak balita.
10		PAPEDA ODGJ (Paguyuban Peduli pada Orang dengan Gangguan Jiwa)	Merupakan wadah masyarakat yang peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa yang melibatkan petugas kesehatan puskesmas, kader kesehatan jiwa dan lintas sektor yang berperan.
11.		TERANG BULAN MAS BARJO (TEman RiANG iBU saat kehamiLAN di puskesMAS BanjaReJO)	Inovasi mengenai edukasi Kesehatan terbaru pada ibu hamil melalui Leaflet dan video animasi di sosial media, berkaitan dengan tanda dan bahaya saat kehamilan serta pencegahan agar ibu hamil

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			terhindar dari penyulit kehamilan. Tujuan inovasi ini adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya komplikasi hingga kematian pada ibu hamil dan bayi baru lahir.
12.		KENALI WATAK MAS BARJO (KENALI kegaWATAn anaK balita di puskesMAS BANjaReJO)	Bertujuan untuk menjadi sarana informasi dan edukasi kepada orang tua maupun pengasuh agar dapat melakukan perawatan balita sakit di rumah dan mengetahui apa saja tanda kegawatannya sehingga tidak terlambat untuk di bawa ke fasilitas kesehatan.
13.		PITA SI KUMBANG DUREN (PIJAT BADUTA STIMULASI UNTUK TUMBUH KEMBANG TIDUR NYENYAK)	Merupakan pelayanan pijat bayi dibawah dua tahun, guna menstimulasi untuk tumbuh kembang, dan tidur nyenyak. Bertempat di Pustu Josenan, pelayanan Pita Si Kumbang Duren dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yang terampil dan berpengalaman.
14.		PINOKIA (Pojoy INformasi Obat Khusus lansIA)	Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi obat bagi pasien lansia serta meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga pasien terkait informasi obat khususnya pada lansia.
15.		LINTANG NDARU (LAYANAN POLI PETANG DAN GAWAT DARURAT)	Inovasi dilatar belakangi kepatuhan pasien dengan penyakit degeneratif (hipertensi dan diabetes mellitus) control ke puskesmas pada saat jam pelayanan. Oleh karena itu mengakomodir masyarakat akan control rutin dan Layanan Gawat Darurat maka Puskesmas

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Tawangrejo memiliki inovasi LINTANG NDARU (Layanan poli petang dan gawat darurat). Pelayanan poli petang mulai jam 16.00 sampai jam 20.00. Layanan Gawat darurat mulai 07.00 sampai jam 20.00.
16.		GESIT MASTARJO (GERAKAN SADAR IMUNISASI PUSKESMAS TAWANGREJO)	Kegiatan pelayanan imunisasi yaitu adanya Gerakan sadar imunisasi di puskesmas tawangrejo melalui group WhatsApp yang terdiri bidan wilayah, ibu bayi dan balita, kader kesehatan, promkes wilayah dan dokter.
17.		PENDEKAR BELI CETING (Pendampingan Konsumsi Bersama Peduli Cegah Stunting)	Pendekar Beli Ceting (Pendampingan Konsumsi Bersama Peduli Cegah Stunting) merupakan pelayanan gizi yang berorientasi pada balita <i>stunted</i> dan <i>wasted</i> dengan memberikan modifikasi formula WHO F-100 serta pendampingan konsumsi balita melalui <i>food record</i> selama 2 x 24 jam setelah balita dinyatakan bisa pulang dari rumah sakit. Balita yang mengalami <i>stunted</i> dan <i>wasted</i> pada ruang rawat inap mendapatkan tambahan makanan berupa Puding Sedot sebagai modifikasi Formula WHO sebanyak 2 x 200 ml per hari. Balita yang pulang dari rumah sakit, dilakukan monitoring selama 2 hari secara <i>online</i> melalui <i>WhatsApp</i> menggunakan formulir <i>food record</i> untuk melihat pola pemberian

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			makanan balita secara kualitas maupun kuantitas. Saat kontrol di Poli Anak dan Poli Gizi, balita dan keluarga dilakukan evaluasi terkait pengetahuan dan pemahaman keluarga balita dalam pemberian makanan yang tepat melalui hasil <i>food record</i> secara kualitatif maupun kuantitatif. Harapannya, terdapat perubahan pola makan balita ke arah yang tepat sehingga dapat mengejar tumbuh kembang sesuai usianya.
18.		GERCEP (GERakan Cek skrening dan Pemeriksaan terpadu penyakit tidak menular) Puskesmas Tawangrejo	Puskesmas Tawangrejo. Inovasi GERCEP merupakan inovasi baru di bidang kesehatan yaitu tentang masyarakat diberikan fasilitas dan bimbingan untuk ikut berpartisipasi dalam pengendalian faktor risiko PTM (Penyakit Tidak Menular) dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan deteksi dini, monitoring faktor risiko PTM serta tindak lanjutnya. Tidak hanya itu kegiatan ini dilaksanakan pada Arisan RT yang dapat menjangkau sasaran yang lebih banyak, karena pelaksanaannya pada sore atau malam hari serta dilingkungan tempat tinggal, sehingga seluruh masyarakat (usia 15th keatas) bisa ikut berpartisipasi.
19.		ELENG KB LIN (Edukasi,	ELENG KB LIN (Edukasi, konseLing dan monitoRING KB pasca persaLINan) adalah merupakan

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		konseLing, dan monitoriNG)	inovasi baru di bidang kesehatan Keluarga Berencana (KB). Inovasi ELENG KB LIN bertujuan untuk meningkatkan capaian KBPP secara berkesinambungan dengan memperkenalkan manfaat dan pentingnya KBPP pada ibu dan suami sejak masa kehamilan hingga mengawal ibu nifas sampai menggunakan KBPP yang dipilihnya. Upaya pengaturan kelahiran dapat dilakukan dengan mencegah kehamilan menggunakan metode atau alat kontrasepsi. Hambatan terbesar di bidang KB yaitu masih tingginya angka unmet need di Indonesia. Unmet need adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, dimana perempuan usia subur yang telah kawin memiliki keinginan untuk menjarangkan kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi. Untuk menurunkan unmet need melalui peningkatan capaian KB pasca persalinan, maka dibutuhkan terobosan baru yang berkesinambungan seperti ELENG KB LIN.
20.		GARAM BU MUKIDI (Program Ibu Membaca Buku KIA dan Deteksi Dini)	Merupakan sesuatu yang segar dan unik dalam penerapannya ke masyarakat. Masalah Kesehatan ibu hamil dan balita yang multifaktor membuat tenaga kesehatan dituntut terus berinovasi

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			<p>dalam memecahkan masalah. Pada pelaksanaannya inovasi ini akan menugaskan dokter umum sebagai narasumber yang akan memberikan edukasi bersumber dari buku KIA yang bertujuan mempromosikan buku KIA kepada ibu hamil bahwa konten buku tersebut mudah dan informatif, selain itu dokter akan melakukan deteksi dini dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik dilanjutkan dengan sesi konsultasi psikologis ibu hamil. Inovasi GARAM BU MUKIDI bertujuan agar Puskesmas Sukosari dapat berperan serta mendukung tercapainya target SDGs dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Misi Walikota Madiun dalam bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan optimal kepada ibu hamil berupa edukasi yang komprehensif dan deteksi dini sehingga AKI, AKB dan Stunting bisa diturunkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.</p>
21.		SI BUTAR ASIX (EDUKASI IBU PINTAR SUKSES ASI EKSKLUSIF)	<p>Inovasi SI BUTAR ASIX yang merupakan inovasi baru di bidang kesehatan hadir untuk meningkatkan capaian pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja UPTD</p>

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			<p>Puskesmas Sukosari melalui kegiatan edukasi pada ibu hamil dalam rangka persiapan menyusui ketika bayinya lahir kelak. Keunikan atau kebaruan dari inovasi SI BUTAR ASIX ini adalah penyampaian edukasi melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai ASI eksklusif, inovasi ini berkontribusi dalam menurunkan risiko stunting pada anak.</p>
22.		KAWAN DISKA (KAWAN DINAS KESEHATAN)	<p>Inovasi “KAWAN DISKA” yang memiliki akronim KAWAN DINAS KESEHATAN merupakan salah satu upaya dalam rangka penyebarluasan informasi kesehatan ataupun informasi pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Madiun pada masa Pandemi yang dikemas dalam bentuk video menarik berupa video animasi, video sederhana, podcast, poster serta repost infokes dari Platform Kesehatan lainnya.</p>
23.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PECEL PAK KASTAN (Pelayanan Cepat dan Langsung, Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pertanian)	<p>Inovasi PECEL PAK KASTAN adalah inovasi baru, dimana pelayanan SKKH melalui aplikasi PECELPAKKASTAN adalah aplikasi SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) yang diciptakan sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan kemudahan dalam proses penerbitan surat keterangan</p>

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			kesehatan hewan. Proses pembuatan SKKH menjadi lebih cepat karena langsung di tandatangi secara elektronik oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV). PECEL PAK KASTAN menunjukkan inovasi yang signifikan dalam pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi.
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika	JEBOL KIPER (Jemput Bola Komunikasi Informasi Publik dan Evaluasi LAPOR!)	Sebuah program dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan organisasi sosial, untuk berperan sebagai penghubung informasi dan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta pengaduan.
25.		MBANGUN SWARGA (Madiun Membangun, Sejahtera Bersama Warga)	Sebuah aplikasi untuk penanganan sosial kemasyarakatan dimana aplikasi tersebut bertujuan mendapatkan data keseluruhan secara terintegrasi, tanpa mengganggu operasional aplikasi yang berjalan di PD pelayanan.
26.		Sistem Informasi Operasi Pasar Kota Madiun (SIOPA OMA)	Tujuan SIOPA OMA adalah meningkatkan transparansi dengan memudahkan sistem pencatatan dan pengecekan setiap transaksi

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			<p>sehingga terdistribusi secara merata. SIOPA OMA membantu warga Kota Madiun membeli bahan pokok dengan lebih mudah dan teratur, mengurangi antrian panjang. Dengan sistem ini, semua transaksi pembelian tercatat dengan baik, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan menghindari pembelian berulang. Inovasi ini berkontribusi menurunkan inflasi di Kota Madiun, sehingga harga barang tetap stabil.</p>
27.		<p>SUPER TEKTONIK (Solusi Cepat, Efektif, dan Berintegritas dengan Tanda Tangan Elektronik)</p>	<p>Layanan keamanan informasi berupa tanda tangan elektronik (TTE) untuk mengesahkan surat atau dokumen di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Inovasi ini menghilangkan kebutuhan akan proses manual yang lama, seperti penggunaan nota dinas dan tatap muka untuk penandatanganan, sehingga mempercepat penerbitan surat menjadi tidak lebih dari 1x24 jam.</p>
28.		<p>Market Place Kota Madiun (e-Pasar Kota Madiun)</p>	<p>Inovasi ini menciptakan platform digital yang mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun, memudahkan mereka untuk mempromosikan dan menjual produk secara online. Masyarakat dapat mengakses berbagai produk dengan mudah melalui aplikasi, yang meningkatkan kenyamanan</p>

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			dalam berbelanja dan memperluas jangkauan pasar bagi pelaku UMKM. Dengan memudahkan transaksi yang lebih efisien, e-Pasar berkontribusi pada penggerakan ekonomi daerah, membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
29.		AWAK SIGAP (Aduan WArga Kami Slap seGera tanggAP)	Tujuan program AWAK SIGAP adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan/permohonan pelayanan publik, khususnya di wilayah Kota Madiun. Bantuan diberikan dengan segera, responsif dan aspiratif demi terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat. Selain mendukung peningkatan pelayanan publik, dapat menjadi referensi dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik yang lebih baik. Dengan memanfaatkan aplikasi Wappin (salah satu WhatsApp Business Platform), dapat memberikan layanan kegawatdaruratan, layanan ini menampung segala macam pengaduan, baik internal Pemerintah Kota Madiun maupun untuk masyarakat umum.
30.		Si Anak Mass Juna (Sistem Analisa	Dengan platform digital yang dikembangkan, masyarakat dan

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
		Media Massa Maju Mendunia)	unit organisasi lain dapat dengan mudah mengakses informasi terkait berita dan isu publik, meningkatkan transparansi dalam komunikasi pemerintah. Si Anak Mass Juna memberikan data dan rekomendasi bagi pengambilan keputusan pemerintah, membantu dalam penentuan agenda dan pengelolaan isu. Inovasi ini memperkuat sinergi antara pemerintah dan media massa, penting untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun opini publik yang positif.
31.	Dinas Lingkungan Hidup	SILAPLING (Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan)	Sistem informasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk mempermudah pelaku usaha dalam melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. SILAPLING menggunakan metode TAPISAN Mc. Namara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan, serta mengacu pada dokumen lingkungan induk UKL UPL. SILAPLING, diharapkan pelaporan lingkungan menjadi lebih sistematis, transparan, dan akuntabel, mendukung tujuan smart city di Kota Madiun.
32.		DAPUR UMUM GAS METHAN	Program yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk memanfaatkan gas

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			metana sebagai sumber energi alternatif dalam memasak. Program ini bertujuan untuk menyediakan dapur umum gratis bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu dan pelaku UMKM. Inovasi ini tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
33.		SITEBAS (Sistem Informasi Terpadu Bank Sampah)	Aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk mempermudah pengumpulan data dan pemantauan aktivitas Bank Sampah di daerah tersebut. Mempermudah pengumpulan data dari Bank Sampah dan menghemat waktu serta tenaga dalam pengolahan informasi. SITEBAS, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Madiun menjadi lebih efisien dan terorganisir.
34.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi)	Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) bukan hanya sebagai penataan saluran drainase agar tidak terjadi genangan air, tetapi juga mencangkup dalam hal estetika kota melalui penataan kabel udara ke dalam saluran dengan menggunakan box cuvert. Dengan sistem saluran drainase tertutup dan ditambah pembangunan area pedestrian diatas saluran drainase ini.

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			<p>Ecodrain Mesi (Eco-Drainase Multifungsi) merupakan inovasi pembangunan saluran drainase dengan menggunakan sistem saluran drainase tertutup yang tetap mempertahankan nilai unsur estetika dan kemanfaatan ekonomi. Tujuan dari program inovasi ini untuk mengatasi permasalahan terjadinya genangan air bahkan banjir akibat berkurangnya areal resapan ketika musim penghujan di Kota Madiun. Selain berfungsi sebagai penanganan genangan air dan banjir, inovasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pencemaran air yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap, penumpukan sampah akibat membuang sampah sembarangan di area saluran drainase dan mengatasi kondisi lingkungan yang terlihat kumuh dan tidak memiliki nilai estetika dengan pembangunan area pedestrian di atas saluran drainase.</p>
35.		<p>PARTNER MATARAM (Pahlawan Street Center Madiun Kota Ramah dan Aman)</p>	<p>PARTNER MATARAM (Pahlawan Street Center Madiun Kota Ramah dan Aman) yaitu mengubah PSC dari kawasan yang sering banjir dan kumuh menjadi kawasan yang ikonik dan instagramable dengan memadukan kekhasan Kota Madiun dan ikon dunia internasional seperti Patung Merlion Singapura, Kereta Cepat</p>

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			Shinkansen Jepang, Galeri 6 Negara, Ka'bah, Kampung Eropa, Jembatan, Menara Eiffel dan Replika 6 Agama dalam 1 kawasan terpadu.
36.	Dinas Pendidikan	Be Smart (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun)	Inovasi Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun) merupakan bantuan Beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga harapan Pemkot Madiun agar memiliki SDM yang berkualitas. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan berupaya untuk terus melanjutkan Program Bantuan Be Smart Beasiswa Mahasiswa. Harapannya Program Bantuan Be Smart Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dapat membantu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan dapat bermanfaat kepada mahasiswa yang memang terkendala biaya kuliahnya, terutama bagi mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yatim piatu. Be Smart Madiun (Beasiswa Mahasiswa Rakyat Kota Madiun) adalah Inovasi untuk pendaftaran Beasiswa secara online tujuannya adalah mempermudah masyarakat untuk mengakses aplikasi pendaftaran. Dengan (Be SMART) MADIUN akan mencetak masyarakat Kota Madiun yang cerdas dan berkualitas

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
37.		DOPARI SAKATU (Dongeng Pagi hari Selasa, Kamis, Sabtu)	SDN 02 Mojorejo Kota Madiun memiliki siswa berjumlah 564 yang terdistribusi dalam 18 kelas. Data tahun 2014 nilai rata-rata kenaikan kelas siswa rendah, data kedisiplinan siswa menunjukkan yang terlambat datang ke sekolah rata-rata mencapai 15 sampai dengan 20 siswa per kelas tiap bulannya. Data kenakalan siswa juga menunjukkan 3 sampai dengan 4 kasus anak setiap harinya. Tanggung jawab siswa terhadap tugas sekolah kurang. Data yang di himpun dari buku catatan wali kelas masing-masing terdapat 4-5 siswa di masing-masing kelas tidak mengerjakan tugas sekolah. Melalui Dopari sakatu, nilai rata-rata siswa di bawah KKM menurun menjadi 5%. Siswa terlambat datang sekolah berkurang 2 sampai 0 siswa per hari. Kasus kenakalan berkurang menjadi 8 kasus. Minat baca siswa meningkat.
38.		WISUDA SITI DIMANJA (Wisata Edukasi Outdoor Learning Berbasis Teknologi Informasi Lejitkan Kemampuan Discovery, Kemandirian dan Kerjasama)	Menumbuhkan kemampuan discovery (menemukan konsep/pengetahuan baru) dengan memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan sekitar yang tidak tersedia di dalam menumbuhkan sikap kemandirian (dapat meregulasi diri sendiri), serta meningkatkan sikap kerjasama

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			(mampu berkolaborasi efektif untuk mencapai tujuan)
39.		APRESIASI SI ANDRO (Aplikasi Presensi Digital Berbasis Website dan Android)	Inovasi ini mengubah sistem presensi manual menjadi digital, memungkinkan siswa untuk melakukan absensi secara online melalui aplikasi, yang meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Selama handphone terkoneksi internet, pemberitahuan akan masuk. Hal ini memudahkan orang tua/walimurid untuk memantau keberadaan anaknya di sekolah. Sistem ini memberikan kemudahan bagi guru dan pihak sekolah dalam memantau tingkat kehadiran siswa, serta meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dengan sistem presensi digital, data kehadiran siswa dicatat secara <i>real-time</i> dan disimpan dengan aman, mengurangi risiko manipulasi dan kehilangan data.
40.		IDOLA@madiunpinter.co.id (Information, Documentation on Learning Administration with madiunpinter.id)	Inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk mengoptimalkan manajemen informasi dan dokumentasi di bidang pendidikan. Inovasi ini memungkinkan siswa dan guru mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, menggunakan berbagai perangkat seperti laptop dan smartphone. Semua data dan informasi terkait pembelajaran dapat diakses oleh siswa dan orang

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			tua, meningkatkan transparansi dan kolaborasi antara guru dan siswa.
41.		RUMAH IBU, LAYANAN PERUNDUNGAN DAN INKLUSI BERBASIS SMILE	Inovasi ini dirancang untuk mengatasi masalah perundungan di SMPN 11 Madiun, dengan memberikan dukungan psikologis dan pendampingan kepada korban dan pelaku. Rumah Ibu tidak hanya fokus pada siswa, tetapi juga melibatkan orang tua dan guru dalam upaya mengurangi perundungan dan menciptakan lingkungan yang aman. Dengan teknik coaching dan konseling, siswa diajak untuk mengolah perasaan dan mencari solusi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka.
42.		KITA STEPA (KELAS BERSIH KARAKTER DIRAIH)	inovasi yang dikembangkan oleh SMP Negeri 4 Madiun untuk meningkatkan kesadaran dan karakter peduli lingkungan di kalangan siswa. Program ini berfokus pada kebersihan kelas sebagai langkah awal dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui aplikasi digital untuk monitoring kebersihan, siswa diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan belajar mereka. Proses penilaian kebersihan dilakukan secara digital, memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Semua pihak, termasuk siswa dan wali kelas,

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			dapat mengakses penilaian kebersihan secara transparan.
43.		BANK BESTI - Bank Best Practice	inovasi dari SMP Negeri 4 Madiun yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas guru melalui pengembangan dan berbagi praktik terbaik dalam pembelajaran. Dengan platform digital, BANK BESTI memfasilitasi guru dalam menyusun dan menyimpan praktik baik, serta memotivasi mereka untuk menciptakan metode pengajaran yang inovatif. Inovasi ini membantu memulihkan proses belajar setelah kehilangan pembelajaran (loss learning) dan telah berhasil direplikasi di daerah lain, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. BANK BESTI merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan profesionalisme guru dan penerapan praktik pembelajaran yang inovatif.
44.		GEN KEHATI (Green Entrepreneur Keanekaragaman Hayati)	Inovasi ini bertujuan memaksimalkan potensi pemanfaatan lingkungan yang ada di sekolah menjadi suatu program unggulan yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, isu-isu kurang pedulinya seluruh warga sekolah dalam pemanfaatan potensi lingkungan yang ada dapat terhindar dengan adanya inovasi

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			ini. GEN KEHATI berhasil memanfaatkan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah, seperti pohon trembesi, daun cincau, dan kelor, untuk menciptakan produk olahan bernilai ekonomi.
45.		OM IRENG (Omong Inggris Bareng)	program yang diluncurkan oleh SMPN 5 Madiun untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di kalangan guru dan staf tata usaha. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dalam bahasa Inggris, meningkatkan literasi bahasa, dan mendukung penguasaan teknologi yang diperlukan dalam pembelajaran. Keberhasilan meningkatkan kemampuan bahasa inggris guru, memfasilitasi penggunaan bahasa dalam kegiatan sehari-hari, dan membantu mereka dalam mengakses informasi yang lebih berkualitas.
46.		Edukasi Outdoor Laerning	Pelajar adalah merupakan inovasi baru yang sebelumnya belum ada, Inovasi ini dalam memperkenalkan dunia pertanian dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu outclass dan inclass. Pada sesi outclass siswa akan dipandu untuk dikenalkan mulai cara budidaya beberapa jenis hewan peliharaan beserta cara merawatnya juga praktik memperbanyak tanaman sederhana. Sedangkan pada sesi

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			inclass akan ditayangkan beberapa video yang mengenalkan siswa pada jenis tanaman, proses perkembangbiakan tanaman, jenis hewan peliharaan, bahan makanan sehat yang berasal dari hewan, ikan dan tanaman.
47.		"SIKAP SeBeNingMaS" (Sistem Informasi Komunikasi dan Administrasi Pembelajaran Sekolah Berbasis Learning	SIKAP SeBeNingMaS merupakan Inovasi Layanan dalam bidang Pendidikan yang mengutamakan kepada pelayanan terhadap warga masyarakat ditingkat Pendidikan Dasar (SD-SMP). Layanan ini berjalan secara Daring (Dalam Jaringan/Online) melalui seperangkat Tool dan Model yang disesuaikan dengan menggunakan Domain @madiunpintar.id.
48.		LAPIS INKLUWINDU (Pola Terapi Siswa Inklusi Winongo Dua)	Inovasi baru dengan solusi untuk membantu siswa kebutuhan khusus. Tujuan dari terapi yaitu membantu anak dengan gangguan belajar, perkembangan, dan perilaku untuk bisa menumbuhkan perilaku kemandirian anak. Terapi untuk anak berkebutuhan khusus sebenarnya sangat banyak jenisnya. Pemilihan terapi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap anak. Adapun macam terapi yang dilakukan yaitu terapi motorik, terapi Konsentrasi, terapi Bina Diri atau Terapi sesuai kebutuhan anak. APIS INKLUWINDU berfokus pada inklusi dan pengembangan

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
49.		LIDI GUNUNG JATI (Literasi Digital Gunung Jati)	<p>siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan sekolah reguler.</p> <p>Program inovasi baru dari sekolah untuk menjawab permasalahan yang berkembang yaitu untuk mewujudkan budaya literasi di SDN Pangongangan. Inovasi ini berhasil meningkatkan minat baca siswa di SDN Pangongangan melalui pengenalan literasi digital yang menarik dan interaktif, menggunakan platform berbasis TIK. Dengan memanfaatkan aplikasi Google Sites, LIDI GUNUNG JATI menyediakan akses ke berbagai sumber belajar, termasuk buku digital dan materi edukatif, yang mendukung pembelajaran siswa.</p>
50.	Dinas Perdagangan	WARTEK (WARUNG TEKAN INFLASI)	<p>Wartek merupakan sarana atau tempat menjual barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Bekerjasama dengan Perumda Aneka Usaha, PT. PPI dan BULOG, menyediakan barang kebutuhan pokok untuk masyarakat umum. Barang kebutuhan pokok yang dijual di Wartek antara lain beras, minyak, telur, gula, cabe rawit dan bawang merah. Wartek sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan terjangkau dibanding harga pasar. Lebih murah karena dijual dengan</p>

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			menggunakan subsidi harga dan subsidi angkut.
51.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	EMPOK REMEN (kElomPOK REmaja MENulis)	Inovasi ini berhasil meningkatkan budaya literasi di kalangan remaja di Kota Madiun, mengajak mereka untuk aktif menulis dan mendokumentasikan potensi serta kekayaan lokal. Selain meningkatkan keterampilan menulis, program ini juga memberikan pelatihan berorganisasi, menjadikan peserta sebagai Duta Literasi yang mempromosikan literasi di lingkungan mereka. Inovasi ini sejalan dengan peraturan perpustakaan nasional, dimana peningkatan koleksi konten lokal menjadi fokus utama, membantu perpustakaan memenuhi standar yang ditetapkan.
52.		D'ARTIS (Digitalisasi Arsip Statis)	D'ARTIS berperan penting dalam modernisasi sistem kearsipan di Kota Madiun, meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung efisiensi pemerintahan. D'ARTIS merupakan langkah signifikan dalam mengubah cara pengelolaan arsip statis menjadi sistem digital, memungkinkan penyimpanan dan akses yang lebih efisien. Melalui digitalisasi, pengelolaan arsip menjadi lebih simpel, cepat, dan hemat ruang. Ini mengurangi

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			hambatan konvensional dalam pengelolaan arsip fisik.
53.	Dinas Sosial PP dan PA	TALI JIWO (Taman peduli Jiwa Warga Odgj)	TALI JIWO merupakan program inovatif yang mengintegrasikan berbagai sektor untuk menangani masalah kesehatan jiwa, khususnya bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kelurahan Taman. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk mendukung ODGJ agar dapat hidup mandiri dan diterima di masyarakat. TALI JIWO bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup ODGJ, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan serta bantuan sosial.
54.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	LIK PAKAR (Layanan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran)	LIK PAKAR merupakan nama aplikasi mobile dengan menggunakan nama kearifan local sebagai sarana untuk memangkas atau meyederhanakan dan mempercepat prosedur pelayanan penanggulangan kebakaran sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi, pelaporan kejadian kebakaran secara cepat (menggunakan panic button), edukasi, pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran dan inspeksi alat

No.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			pemadam kebakaran secara efektif dan efisien untuk menyusun aplikasi, maka perlu penetapan Penggunaan Aplikasi LIK PAKAR.
55.	Kecamatan Taman	PECEL TUMPANG (PElayanan CEpat, Langsung, hemat wakTU dan gaMPANG)	sistem layanan administrasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Kelurahan Taman, Kota Madiun. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Tahun Anggaran 2024 dengan tingkat capaiannya. Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kota Madiun sangat mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi stakeholder, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kota Madiun dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Madiun yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Madiun di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.

Segala saran, kritik dan masukan tentang Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Walikota Madiun Periode Tahun 2024 dari masyarakat diberikan waktu selama 30 hari dan dapat disampaikan ke Pemerintah Kota Madiun melalui :

1. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun, Jalan Pahlawan No.37 Madiun
2. Email : bagpem.kotamadiun@gmail.com

